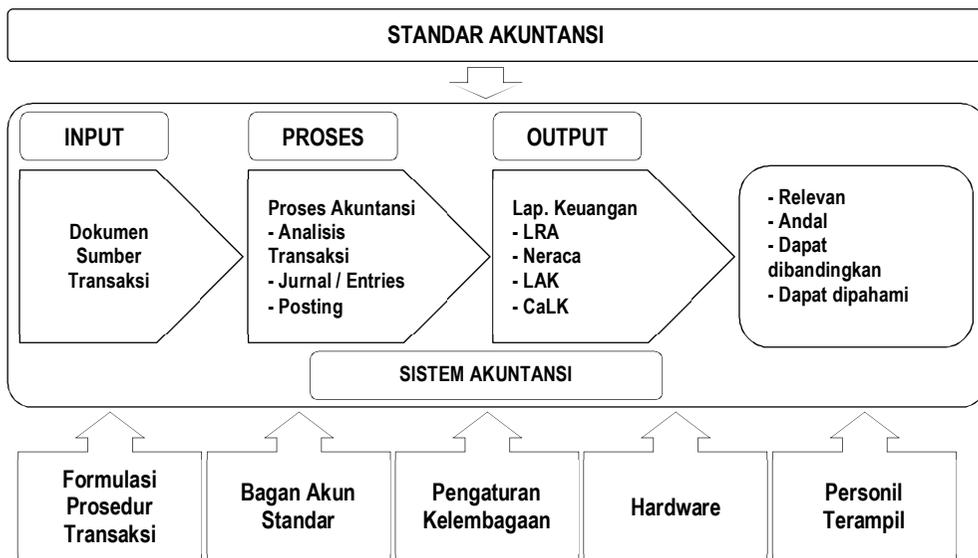


oleh pemerintah kita guna menuju *Good Governance* dan *Clean Government*. Pada Pemerintahan kinerja Satuan Kerja yang lebih dikenal dengan istilah “Satker” bisa dilihat dari pelaporan kinerja itu sendiri yang disebut dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Ada banyak variabel yang terkait dengan kinerja satuan kerja, karena sekarang lagi gencar-gencarnya pemberantasan korupsi di jajaran pemerintahan karena penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, maka peneliti mencoba mengkaitkannya dengan masalah-masalah yang sering di alami oleh pejabat/ petugas/pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Gambar 1
Standar dan Sistem Akuntansi



Sumber: KemenKeu RI, Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah ‘SAPP’, 2012, ppt 9.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dijelaskan standar akuntansi pemerintah, bila setiap pegawai memahami dengan benar tentang akuntansi pemerintah maka di instansi-instansi pemerintah kurang diketemukan pegawai yang mengurus masalah keuangan negara tetapi latar belakang pendidikan yang mereka sandang berbeda dengan pekerjaannya, memang ada pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti dan

banyak dari mereka sudah cukup lama menggeluti pekerjaan ini. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Lingkungan kerja pegawai di sebagian Kantor Instansi Pemerintah ditemukan suasana kerja yang kurang baik, adanya pegawai yang bekerja dengan santai, masuk kantor senin kamis, keluar kantor seenaknya pada jam-jam kerja, sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka adalah abdi masyarakat, atasan yang otoriter tidak mengikuti aturan, kebijakan yang diambil berdasarkan kepentingan tertentu dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak baik dijadikan teladan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sama sekali pelayanan yang diberikan pegawai tidak mencerminkan bahwa pegawai dalam menjalankan tugas berorientasi pada hasil, serta mengedepankan asas manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Memang tidak semua pegawai bekerja seperti itu, banyak juga pegawai atau karyawan yang bekerja dengan tekun, bekerja dengan rajin dan penuh tanggung jawab, namun citra pegawai negeri bagi masyarakat secara keseluruhan kurang bagus.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah pokok : 1) Apakah Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja? 2) Apakah Pengelolaan Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja? 3) Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja? 4) Apakah Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Lingkungan Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja?

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Keerom yang merupakan lingkup langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat akan dijelaskan dengan angka-angka (kuantitatif). Karena yang diukur adalah sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Penelitian menggunakan data kontinum (data yang bervariasi) dan berskala *likert* dengan tingkat data interval (rasio) dalam bentuk *checklist*. Dalam penelitian ini tingkatan data interval untuk semua variabel penelitian dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu : sangat tinggi (nilai skor 5), tinggi (nilai skor 4), sedang (nilai skor 3), rendah (nilai skor 2) dan sangat rendah (nilai skor 1).

Sumber Data

Penelitian ini dirancang sebagai suatu riset survey yang bersifat eksplanasi (*eksplanatory research atau confirmatory research*) yang artinya suatu penelitian yang hendak mengetahui dan menjelaskan hubungan atau pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara penyajian hipotesis. Data tentang pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan pemerintah, lingkungan kerja dan kinerja satuan kerja dikumpulkan menurut indikator pengukuran tersebut, adalah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari objek (responden) penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengamati, mengumpulkan dan mengelompokkan data dan informasi yang terdapat di lapangan agar sesuai dengan indikator yang dipilih dan selaras dengan teori/konsep yang sudah ditetapkan.

Studi Kepustakaan

Dengan melakukan pengamatan terhadap hasil penelitian yang terdahulu untuk memperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang gejala-gejala yang muncul dalam proses pengumpulan data.

4. Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas maka dihitung koefisien korelasi antara masing-masing skor total dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson* yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2007:80) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

R_{xy} = Korelasi *Product Moment*

X = Skor Item

Y = Skor Total

N = Jumlah Responden

Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliabel*). Untuk menginterpretasikan tingkat hubungan antara masing-masing sub variabel bebas dengan variabel bebas (X1, X2 dan X3) dengan variabel terikat Y, digunakan pedoman menurut Kaplan

Saccuzo dalam Sugiyono (2008:97) mengatakan bahwa koefisien reliabilitas yang besarnya antara 0.70 – 0.80 dianggap kuat dan sangat kuat hubungannya ini digunakan untuk mengetahui kemantapan atau ketepatan alat, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Dikatakan reliabel jika nilai *alpha cronbach* (α) lebih besar atau sama dengan 0.6. Karena hipotesis penelitian menunjuk pada penelitian korelatif, maka teknik analisis data dengan metode statistik regresi berganda (*multiple regression analysis*).

5. Teknik Analisis data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Alat analisis data yang digunakan adalah penelitian dengan model regresi linear berganda. *Independent variable* (variabel bebas) adalah Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Lingkungan Kerja. *Dependent variable* (variabel tak bebas/variabel terikat) adalah Kinerja Satuan Kerja. Dengan demikian, model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KSK = a + b1 PSAKP + b2 PKP + b3 LK + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- KSK* : Kinerja Satuan Kerja
- a* : Konstanta
- b1, b2, b3* : Koefisien Korelasi
- PSAKP* : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah
- PKP* : Pengelolaan Keuangan Pemerintah
- LK* : Lingkungan Kerja
- e* : *standard error*

1) Uji Koefisien Regresi Parsial, Uji t

Uji koefisien regresi parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (*independent variabel*) terhadap perubahan variabel tak bebas (*dependent variabel*).

2) Uji Ketepatan Model, Uji *F*

Uji ketepatan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan model sudah tepat atau fit.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ketepatan perkiraan (R^2) dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi.

6. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikannya 5%. Kriteria pengujiannya adalah :

H_0 : Koefisien regresi tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh

H_a : Koefisien regresi signifikan atau terdapat pengaruh

Jika probabilitas > 0,05 maka H_0 di terima

Jika probabilitas < 0,05 maka H_0 di tolak

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah

Hasil pengujian deskripsi variabel Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1) dijelaskan tabel berikut :

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Item-item yang berkaitan dengan Variabel Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1)

No.	Item	Skor					Jumlah	Rata-rata
		5	4	3	2	1		
		SP	P	N	TP	STP		
1	X1.1	6	29	21	6	0	62	3.56
2	X1.2	11	26	23	2	0	62	3.74
3	X1.3	15	35	11	1	0	62	4.03
4	X1.4	19	25	15	3	0	62	3.97
5	X1.5	16	29	16	1	0	62	3.97
6	X1.6	14	35	11	2	0	62	3.98
7	X1.7	10	25	25	2	0	62	3.69
8	X1.8	17	34	10	1	0	62	4.08
Rata-rata								3.88

Sumber : Data diolah, 2015

Item pertama dari variabel X1 adalah Pemahaman Peraturan Pemerintah tentang Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (X1.1). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan paham yaitu sebanyak 29 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan netral sebanyak 21 responden, masing-masing 6 responden menyatakan sangat paham dan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,56 yang berarti responden rata-rata paham dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja di Kabupaten Keerom memahami Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Item kedua dari variabel X1 adalah Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah yang digunakan saat ini yaitu berbasis kas menuju akrual (X1.2). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan paham yaitu sebanyak 26 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan netral sebanyak 23 responden, 11 responden menyatakan sangat paham, 2 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,74 yang berarti responden rata-rata paham dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja di Kabupaten Keerom memahami Sistem akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini yaitu kas menuju akrual.

Item ketiga dari variabel X1 adalah pemahaman sisten akuntansi dalam penyajian laporan keuangan tentang penyusunan laporan realisasi anggaran (X1.3). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan paham yaitu sebanyak 35 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat paham sebanyak 15 responden, 11 responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-

rata skor item menunjukkan 4.03 yang berarti responden rata-rata paham dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja di Kabupaten Keerom memahami penyusunan laporan realisasi anggaran.

Item keempat dari variabel X1 adalah pemahaman sistem akuntansi dalam penyajian laporan keuangan tentang penyusunan neraca (X1.4). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan paham yaitu sebanyak 25 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat paham sebanyak 19 responden, 15 responden menyatakan netral, 3 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,97 yang berarti responden rata-rata paham dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja di Kabupaten Keerom memahami penyusunan neraca.

Item kelima dari variabel X1 adalah pemahaman sistem akuntansi dalam penyajian laporan keuangan tentang penyusunan laporan arus kas (X1.5). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan paham yaitu sebanyak 29 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat paham dan netral masing-masing 16 responden, 1 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,97 yang berarti responden rata-rata paham dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja di Kabupaten Keerom memahami penyusunan laporan arus kas.

Item keenam dari variabel X1 adalah pemahaman sisten akuntansi dalam penyajian laporan keuangan tentang penyusunan catatan atas laporan keuangan (X1.6). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan paham yaitu sebanyak 35 responden. Sedangkan

responden lainnya menyatakan sangat paham sebanyak 14 responden, 11 responden menyatakan netral, 2 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,98 yang berarti responden rata-rata paham dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja di Kabupaten Keerom memahami penyusunan catatan atas laporan keuangan.

Item ketujuh dari variabel X1 adalah pelatihan tentang akuntansi keuangan pemerintah (X1.7). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat paham dan netral yaitu masing-masing sebanyak 25 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat paham sebanyak 10 responden, 2 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,69 yang berarti responden rata-rata paham dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa Satuan Kerja khususnya para pengelola keuangan di Kabupaten Keerom memahami akuntansi keuangan pemerintah lewat pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansinya.

Item terakhir dari variabel X1 adalah pengalaman dalam menggeluti hal yang menyangkut akuntansi keuangan pemerintah (X1.8) yang merupakan rata-rata skor paling tinggi. Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan paham yaitu sebanyak 34 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat paham sebanyak 17 responden, 10 responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak paham serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak paham. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.08 yang berarti responden rata-rata paham dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa melalui pengalaman kerja pegawai itu sendiri sehingga bisa memahami akuntansi keuangan pemerintah.

Dari item pertama sampai item kedelapan didapati rata-rata keseluruhan adalah 3,88 yang berarti rata-rata responden memahami sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Deskripsi variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X2) dijelaskan tabel berikut :

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Item-item yang berkaitan dengan
Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X2)

No.	Item	Skor					Jumlah	Rata-rata
		5	4	3	2	1		
		SS	S	N	TS	STS		
1	X2.1	25	28	8	1	0	62	4.24
2	X2.2	19	31	12	0	0	62	4.11
3	X2.3	18	39	4	1	0	62	4.19
4	X2.4	19	35	7	1	0	62	4.16
5	X2.5	27	23	10	2	0	62	4.21
6	X2.6	25	28	9	0	0	62	4.26
7	X2.7	29	29	4	0	0	62	4.40
8	X2.8	21	31	10	0	0	62	4.18
9	X2.9	31	27	3	1	0	62	4.42
Rata-rata								4.24

Sumber : Data diolah, 2015

Item pertama dari variabel X2 adalah perencanaan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian/Lembaga RKA-KL sesuai dengan visi dan misi satuan kerja (X2.1). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 28 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 28 responden, 8 responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.24 yang berarti responden rata-rata sangat setuju dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa

Kementerian/Lembaga di Kabupaten Keerom dalam menyusun DIPA RKA-KL sangat sesuai dengan visi dan misi satuan kerjanya.

Item kedua dari variabel X2 adalah perencanaan dalam penyusunan rencana kerja (X2.2). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 31 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 19 responden, 12 responden menyatakan netral serta tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.11 yang berarti responden rata-rata setuju dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai di satuan kerjanya masing-masing dalam hal menyusun rencana kerja sesuai dengan pekerjaan yang diembannya.

Item ketiga dari variabel X2 adalah pelaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola keuangan (X2.3). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 39 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 18 responden, 4 responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.19 yang berarti responden rata-rata setuju dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan itu sendiri.

Item keempat dari variabel X2 adalah pelaksanaan dalam peraturan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan (X2.4). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 35 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 19 responden, 7 responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang

menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.16 yang berarti responden rata-rata setuju dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa aturan dalam teknis pelaksanaan pada tugas di setiap pengelola keuangan satuan kerja di Kabupaten Keeron sudah sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan.

Item kelima dari variabel X2 adalah pengawasan dalam penggunaan perangkat lunak pada sistem akuntansi keuangan (X2.5). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 27 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan setuju sebanyak 23 responden, 10 responden menyatakan netral, 2 responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.21 yang berarti responden rata-rata sangat setuju dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam menggunakan perangkat lunak (Software) pada pengelolaan keuangan pemerintah selalu mengupdate sesuai dengan petunjuk dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Item keenam dari variabel X2 adalah pengawasan dalam menyelenggarakan akuntansi keuangan (X2.6). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 28 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden, 9 responden menyatakan netral serta tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.26 yang berarti responden rata-rata sangat setuju dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam menyelenggarakan akuntansi keuangan sudah sangat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Item ketujuh dari variabel X2 adalah pengawasan dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi

keuangan secara berkala (X2.7). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju dan setuju yaitu masing-masing sebanyak 29 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan netral sebanyak 4 responden dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.40 yang berarti responden rata-rata sangat setuju dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan selalu sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan selalu disampaikan secara berkala.

Item kedelapan dari variabel X2 adalah pertanggungjawaban dalam memantau pelaksanaan akuntansi keuangan (X2.8). Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 31 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 21 responden, 10 responden menyatakan netral serta tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.18 yang berarti responden rata-rata setuju dengan pernyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom selalu memantau pelaksanaan akuntansi keuangan yang berkesinambungan.

Item kesembilan dari variabel X2 adalah koordinasi dan konsultasi untuk mencegah kekeliruan (X2.9) yang merupakan rata-rata skor paling tinggi. Hasil penelitian pada Satuan Kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 31 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan setuju sebanyak 27 responden, 3 responden menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak setuju serta tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.42 yang berarti responden rata-rata sangat setuju dengan

penyataan ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom untuk mencegah kekeliruan atau kesalahan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Dari item pertama sampai item kesembilan didapati rata-rata keseluruhan adalah 4,24 yang berarti rata-rata responden sangat setuju dengan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban harus sesuai dan dilaksanakan berdasarkan kedudukan dan kewenangannya.

Lingkungan Kerja

Deskripsi variabel Lingkungan Kerja (X3) dijelaskan tabel berikut :

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Item-item yang berkaitan dengan Variabel Lingkungan Kerja (X3)

No.	Item	Skor					Jumlah	Rata-rata
		5	4	3	2	1		
		SS	S	N	TS	STS		
1	X3.1	20	28	13	1	0	62	4.08
2	X3.2	23	32	7	0	0	62	4.26
3	X3.3	14	26	20	1	1	62	3.82
4	X3.4	10	40	12	0	0	62	3.97
5	X3.5	21	29	10	2	0	62	4.11
6	X3.6	28	24	6	3	1	62	4.21
7	X3.7	16	27	17	2	0	62	3.92
8	X3.8	29	30	3	0	0	62	4.42
9	X3.9	34	23	5	0	0	62	4.47
10	X3.10	25	24	13	0	0	62	4.19
11	X3.11	14	22	17	5	4	62	3.60
12	X3.12	21	19	9	8	5	62	3.69
Rata-rata								4.06

Sumber : Data diolah, 2015

Item pertama dari variabel Lingkungan Kerja (X3) adalah struktur tugas mengenai pembagian tugas dan wewenang (X3.1). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 28 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 20 responden, netral sebanyak 13 responden, tidak setuju sebanyak 1 responden serta

tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,08 (setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja yang ada di Kabupaten Keerom setuju dengan adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang yang diberikan dari atasan.

Item kedua dari variabel X3 adalah struktur tugas mengenai mekanisme kerja yang harus dipatuhi (X3.2). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 32 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 23 responden, netral sebanyak 7 responden dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.26 (sangat setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom sangat setuju atau mematuhi mekanisme yang diberikan atasan dan hirarki pelaksanaan tugas yang diberikan.

Item ketiga dari variabel X3 adalah kebijakan dan administrasi dalam kebijakan satuan kerja hubungan dengan pekerjaan (X3.3). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 26 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan cukup atau netral sebanyak 20 responden, sangat setuju sebanyak 14 responden dan tidak setuju sebanyak 1 responden serta 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,82 atau setuju. Dengan demikian disimpulkan bahwa kebijakan – kebijakan yang diambil pada satuan kerja dan atasan yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai menunjang kelancaran pekerjaan pegawai itu sendiri dan satuan kerja di Kabupaten Keerom.

Item keempat dari variabel X3 adalah kebijakan dan administrasi dalam pekerjaan mengenai administrasi yang diterapkan (X3.4). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa

mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 40 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan cukup sebanyak 12 responden, sangat setuju sebanyak 10 responden dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,97 atau setuju. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam penanganan administrasi yang dibutuhkan berjalan dengan lancar.

Item kelima dari variabel X3 adalah suasana kerja mengenai ruangan kerja yang menunjang pekerjaan (X3.5). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju atau baik yaitu sebanyak 29 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju atau sangat baik sebanyak 21 responden, netral atau cukup baik sebanyak 10 responden dan 2 responden yang menyatakan tidak setuju atau kurang baik serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju atau sangat tidak baik. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4.11 atau setuju (baik). Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom merasa ruang tempat dimana dia bekerja kondisinya baik dan memadai sehingga menunjang pekerjaannya.

Item keenam dari variabel X3 adalah situasi daerah tempat bekerja (X3.6). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 28 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan setuju sebanyak 24 responden, netral atau cukup setuju sebanyak 6 responden dan tidak setuju sebanyak 3 responden serta 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,21 atau sangat setuju. Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai di satuan kerja Kabupaten Keerom sangat setuju bila situasi daerah dimana pegawai itu bekerja dalam keadaan tenang, terkendali dan kondusif.

Item ketujuh dari variabel X3 adalah pola kepemimpinan mengenai perhatian dan loyalitas atasan (X3.7). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 27 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan cukup sebanyak 17 responden, sangat setuju sebanyak 16 responden dan 2 responden yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,92 atau setuju. Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai pada satuan kerja di Kabupaten Keerom merasa baik dan menyenangkan atas loyalitas dan diperhatikan atasan apalagi kalau pegawai tersebut lagi menghadapi kesulitan.

Item kedelapan dari variabel X3 adalah pola kerjasama mengenai hubungan dengan rekan kerja (X3.8). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 30 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan sangat setuju sebanyak 29 responden, cukup sebanyak 3 responden dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,42 atau sangat setuju. Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai pada satuan kerja di Kabupaten Keerom mempunyai hubungan kerjasama yang sangat baik dengan rekan kerja mereka.

Item kesembilan dari variabel X3 adalah pola kerjasama mengenai hubungan dengan atasan (X3.9) yang merupakan rata-rata skor paling tinggi. Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 34 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan setuju sebanyak 23 responden, cukup sebanyak 5 responden dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,47 atau sangat setuju. Dengan demikian disimpulkan

bahwa pegawai pada satuan kerja di Kabupaten Keerom mempunyai hubungan kerjasama yang sangat baik dengan pimpinan atau atasan mereka.

Item kesepuluh dari variabel X3 adalah pola kerjasama mengenai hubungan dengan bawahan/pelaksana/penyuluh/guru/siswa (X3.10). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 25 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan setuju sebanyak 24 responden, cukup sebanyak 13 responden dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,19 atau setuju. Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai satuan kerja di Kabupaten Keerom mempunyai hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan/pelaksana /penyuluh/guru/siswa.

Item kesebelas dari variabel X3 adalah ketersediaan sarana kerja dan prasarana kerja mengenai hardware hubungannya dengan tugas pegawai (X3.11). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju atau puas yaitu sebanyak 22 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan netral atau cukup puas sebanyak 17 responden, sangat setuju atau sangat puas sebanyak 14 responden dan tidak setuju atau tidak puas sebanyak 5 responden serta 4 responden menyatakan peralatan yang dibutuhkan tidak pernah diberikan melainkan memakai peralatan milik pegawai itu sendiri. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,60 atau puas. Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam ketersediaan sarana kerja khususnya peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka dalam hal pengelolaan keuangan di sediakan memadai oleh kantor.

Item keduabelas dari variabel X3 adalah ketersediaan sarana kerja mengenai sarana transportasi (X3.12). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden

menyatakan sangat setuju atau sangat puas yaitu sebanyak 21 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan setuju atau puas sebanyak 19 responden, cukup sebanyak 9 responden dan tidak setuju atau tidak puas sebanyak 8 responden serta sangat tidak setuju atau sangat tidak puas sebanyak 5 responden. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,69 atau puas. Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai khususnya pengelola keuangan pada satuan kerja di Kabupaten Keerom, sarana transpostasi disediakan atau didanai oleh satuan kerja dimana pegawai itu bekerja.

Dari item pertama sampai item duabelas didapati rata-rata keseluruhan adalah 4,06 yang berarti rata-rata reponden setuju atau puas dengan segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai saat ini sehingga berpengaruh baik didalam diri pegawai maupun instansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Kinerja Satuan Kerja

Deskripsi variabel Kinerja satuan kerja (Y) dijelaskan tabel berikut:

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Item-item yang berkaitan dengan Variabel Kinerja Satuan Kerja (Y)

No.	Item	Skor					Jumlah	Rata-rata
		5	4	3	2	1		
		SB	B	M	AK	K		
1	Y1	19	31	11	1	0	62	4.10
2	Y2	11	31	16	3	1	62	3.77
3	Y3	26	28	8	0	0	62	4.29
4	Y4	9	31	13	6	3	62	3.60
5	Y5	6	23	22	2	9	62	3.24
6	Y6	5	29	17	2	9	62	3.31
7	Y7	19	30	11	0	2	62	4.03
8	Y8	20	35	7	0	0	62	4.21
9	Y9	19	32	11	0	0	62	4.13
Rata-rata								3.85

Sumber : Data diolah, 2015

Item pertama dari variabel Y adalah pencapaian program teknis dalam hal kegiatan pelayanan ke masyarakat yang menjadi tugas pokok

satuan kerja (Y1). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 31 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 19 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 11 responden dan tingkat pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang sebanyak 1 responden serta tidak ada responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20%. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,10 atau tingkat pencapaian baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal kegiatan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Item kedua dari variabel Y adalah pencapaian program teknis dalam hal program sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Y2). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 31 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 11 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 16 responden dan tingkat pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang sebanyak 3 responden serta 1 responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20% atau kurang. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3,77 atau tingkat pencapaian baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal pencapaian program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Item ketiga dari variabel Y adalah pencapaian program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis dalam hal belanja pegawai (Y3) yang merupakan rata-rata skor paling tinggi. Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 28 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat

pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 26 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 8 responden dan tidak ada responden menyatakan tingkat pencapaiannya 21%-40% serta tidak ada responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20%. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,29 atau tingkat pencapaian sangat baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal presentasi pencapaian pemenuhan belanja pegawai mayoritas terpenuhi artinya semua belanja pegawai termasuk gaji, gaji 13, dan lain-lain terbayarkan.

Item keempat dari variabel Y adalah pencapaian program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis dalam hal pemenuhan biaya operasional kantor (Y4). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 31 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 13 responden, tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 9 responden dan tingkat pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang sebanyak 6 responden serta 3 responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20%. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3.60 atau tingkat pencapaian baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal pemenuhan biaya operasional kantor tersedia dengan baik.

Item kelima dari variabel Y adalah pencapaian program sarana dan prasarana aparatur dalam hal kecukupannya (Y5). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 23 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 22 responden, 9 responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20% atau kurang dan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 6 responden serta tingkat pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang

sebanyak 2 responden. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3.24 atau tingkat pencapaian memadai. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal kecukupan sarana dan prasarana aparatur memadai yang artinya sebagian pegawai mendapat sarana/prasarana dalam menunjang pekerjaannya dan sebagian pegawai lagi belum atau ada yang tidak sama sekali mendapatkan sarana/prasarana dalam menunjang pekerjaannya.

Item keenam dari variabel Y adalah pencapaian program sarana dan prasarana aparatur dalam hal mutunya (Y6). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 29 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 17 responden, 9 responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20% atau kurang dan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 5 responden serta tingkat pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang sebanyak 2 responden. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 3.31 atau tingkat pencapaian memadai. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal mutu dari sarana dan prasarana yang diberikan pada pegawai pas-pasan saja.

Item ketujuh dari variabel Y adalah pencapaian pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dalam hal opini yang diterima Kementerian/Lembaga dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (Y7). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 30 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 19 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 11 responden, dan 2 responden menyatakan pencapaiannya dibawah dari 20% atau kurang serta tidak ada responden pada tingkat pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang. Bila ditinjau dari rata-rata

skor item menunjukkan 4,03 atau tingkat pencapaian baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah rata-rata sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), ini dibuktikan pada semua Kementerian/Lembaga yang berada langsung di Kabupaten Keerom sudah mendapatkan remunerasi, kecuali yang masih di dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Keerom.

Item kedelapan dari variabel Y adalah pencapaian pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dalam hal laporan pertanggungjawaban keuangan (Y8). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 35 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 20 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 7 responden, dan tidak ada responden menyatakan pencapaiannya 21%-40% atau agak kurang serta tidak ada responden pada tingkat pencapaiannya dibawah dari 20% atau kurang. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,21 atau tingkat pencapaian sangat baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal tingkat kelengkapan dan keakuratan laporan pertanggungjawaban kegiatan tercapai dengan sangat baik.

Item kesembilan dari variabel Y adalah pencapaian pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dalam hal tingkat penyelesaian masalah terkait penyerapan anggaran (Y9). Hasil penelitian pada satuan kerja di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat pencapaiannya 61%-80% atau baik yaitu sebanyak 32 responden. Sedangkan responden lainnya menyatakan tingkat pencapaiannya 81% keatas atau sangat baik sebanyak 19 responden, tingkat pencapaiannya 41%-60% atau memadai sebanyak 11 responden, dan tidak ada responden menyatakan pencapaiannya 21%-40% atau

agak kurang serta tidak ada responden pada tingkat pencapaiannya dibawah dari 20% atau kurang. Bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukkan 4,13 atau tingkat pencapaian baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa satuan kerja di Kabupaten Keerom dalam hal tingkat penyelesaian masalah–masalah yang dihadapi pegawai pada penyerapan anggaran tercapai dengan baik.

Dari item pertama sampai item kesembilan didapati hasil skor rata-rata sebesar 3,85 yang berarti tingkat rata-rata pencapaian kinerja berada di antara 61%-80% atau kinerja satuan kerja yang di capai selama ini adalah baik.

2. Uji instrumen Penelitian

Uji Vadilitas Instrumen

Menurut Aswar dan Friendenberg dalam Ety dkk (2007:48) digunakan harga koefisien korelasi yang minimal saja dengan 0,30. Dengan demikian, semua item yang memiliki korelasi kurang dari 0,30 dapat disisihkan dan item – item yang akan dimasukkan dalam alat tes adalah item – item yang memiliki korelasi di atas 0,30 dengan pengertian : semakin tinggi korelasi itu mendekati angka satu (1,00) maka semakin baik pula konsistensinya.

Tabel 5
Hasil Uji Vadilitas Instrumen Variabel Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1)

Item	Pearson correlation	Keterangan
X1.1	0,691	Valid
X1.2	0,841	Valid
X1.3	0,870	Valid
X1.4	0,765	Valid
X1.5	0,786	Valid
X1.6	0,889	Valid

Item	Pearson correlation	Keterangan
X1.7	0,766	Valid
X1.8	0,663	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5 nampak bahwa nilai korelasi (*pearson correlation*) pada semua item pertanyaan variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (X1) menunjukkan angka yang memiliki korelasi di atas 0,30, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan X1 tersebut valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Instrumen
Variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X2)

Item	Pearson correlation	Keterangan
X2.1	0,525	Valid
X2.2	0,730	Valid
X2.3	0,700	Valid
X2.4	0,629	Valid
X2.5	0,543	Valid
X2.6	0,683	Valid
X2.7	0,709	Valid
X2.8	0,686	Valid
X2.9	0,565	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 6 nampak bahwa nilai korelasi (*pearson correlation*) pada semua item pertanyaan variabel Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X2) menunjukkan angka yang memiliki korelasi di atas 0,30, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan X2 tersebut valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Lingkungan Kerja (X3)

Item	Pearson correlation	Keterangan
X3.1	0,305	Valid

Item	Pearson correlation	Keterangan
X3.2	0,574	Valid
X3.3	0,510	Valid
X3.4	0,581	Valid
X3.5	0,407	Valid
X3.6	0,383	Valid
X3.7	0,510	Valid
X3.8	0,759	Valid
X3.9	0,701	Valid
X3.10	0,313	Valid
X3.11	0,511	Valid
X3.12	0,520	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 7 nampak bahwa nilai korelasi (pearson correlation) pada semua item pertanyaan variabel Lingkungan Kerja (X3) menunjukkan angka yang memiliki korelasi di atas 0,30, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan X3 tersebut valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja Satuan Kerja (Y)

Item	Pearson correlation	Keterangan
Y1	0,611	Valid
Y2	0,606	Valid
Y3	0,622	Valid
Y4	0,799	Valid
Y5	0,772	Valid
Y6	0,693	Valid
Y7	0,580	Valid
Y8	0,703	Valid
Y9	0,573	Valid

Sumber : Data diolah

Uji Reliabilitas

Tabel 9
Hasil Uji Reliabilitas variabel

Variabel	Alpha	Keterangan
Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1)	0,909	Reliabel
Pengelolaan keuangan pemerintah (X2)	0,815	Reliabel
Lingkungan kerja (X3)	0,698	Reliabel
Kinerja satuan kerja (Y)	0,835	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2015

Uji reliabilitas yang digunakan adalah *Alpha Cronbach*. Bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan dalam Tabel 5 bahwa keempat variabel memiliki nilai alpha diatas 0,6 sehingga keempat variabel dinyatakan reliabel. Dengan demikian keempat variabel tersebut dapat digunakan dalam analisis data penelitian.

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan *software SPSS (Statistikal Package for Social Science)* versi 21.0 ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t _{hitung}	Sig	Keterangan
<i>Constant</i>	-0,193	-0,304		
Pemahaman SAKP (X1)	0,022	0,195	0,846	Tidak Signifikan
Pengelolaan KP (X2)	0,129	0,666	0,508	Tidak Signifikan
Lingkungan Kerja (X3)	0,840	4,515	0,000	Signifikan
R	0,658			
R Square	0,433			

<i>Adjusted R Square</i>	0,404
t tabel	2,002
Sig	0,000

Sumber : Data diolah, 2015

Besarnya angka koefisien determinasi atau R square yang diperoleh sebesar 0,433. Ini menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja di Kab. Keerom dipengaruhi oleh variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan pemerintah dan lingkungan kerja sebesar 43,3%, sedangkan sisanya 56,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini diantaranya kepemimpinan, teknologi informatika, aplikasi keuangan, karakteristik pemerintah pusat, sumber daya manusia, budaya dan politik.

Pengujian layak atau tidaknya model ini, maka digunakan angka signifikansi (sig). Didasarkan pada hasil perhitungan, diperoleh angka signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian Ho ditolak dan menerima H1, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka model regresi ini sudah benar dan layak.

Data Tabel 10 dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = -0,193 + 0,022 X_1 + 0,129 X_2 + 0,840 X_3 + e$$

Dalam persamaan regresi diatas, nilai konstanta sebesar -0,193 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1), pengelolaan keuangan pemerintah (X2) dan lingkungan Kerja (X3) yang mempengaruhi, maka kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom akan berkurang sebesar 0,193. Sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah (X1) sebesar 0,022 terhadap kinerja satuan kerja (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah akan

mempengaruhi variabel kinerja satuan kerja sebesar 0,022 jika variabel pengelolaan keuangan pemerintah dan variabel lingkungan kerja adalah nol.

- 2) Nilai koefisien pengelolaan keuangan pemerintah (X2) sebesar 0,129 terhadap kinerja satuan kerja (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengelolaan keuangan pemerintah akan mempengaruhi variabel kinerja satuan kerja sebesar 0,129 jika variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah dan variabel lingkungan kerja adalah nol.
- 3) Nilai koefisien lingkungan kerja (X3) sebesar 0,840 terhadap kinerja satuan kerja (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel lingkungan kerja akan mempengaruhi variabel kinerja satuan kerja sebesar 0,840 jika variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah dan variabel pengelolaan keuangan pemerintah adalah nol.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,195 sedangkan t_{tabel} dengan taraf signifikan 0,050 diperoleh 2,002, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,195 < 2,002$), artinya tidak terdapat pengaruh. Maka hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **hipotesis penelitian pertama ditolak**.

Uji Hipotesis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh nilai nilai t_{hitung} sebesar 0,666 sedangkan t_{tabel} dengan taraf signifikan 0,050 diperoleh 2,002, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,666 < 2,002$), artinya tidak terdapat pengaruh. Maka hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **hipotesis penelitian kedua ditolak**.

Uji Hipotesis Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Satuan Kerja

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh nilai nilai t_{hitung} sebesar 4,515 sedangkan t_{tabel} dengan taraf signifikan 0,050 diperoleh 2,002, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,515 > 2,002$), artinya terdapat pengaruh. Maka hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **hipotesis penelitian ketiga diterima**.

Uji Hipotesis Secara Simultan Variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja

Dari hasil perhitungan diperoleh angka F_{hitung} sebesar 14,786 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,76, dengan nilai sig yaitu 0,000 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14,786 > 2,76$) dan probabilitas $0,000 < 0,05$, ini artinya bahwa secara bersama-sama variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap variabel Kinerja Satuan Kerja. Maka hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **hipotesis penelitian keempat diterima**.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah terhadap kinerja satuan kerja Kabupaten Keerom. Hal ini berarti bahwa pemahaman pegawai satuan kerja pemerintah terhadap sistem akuntansi keuangan pemerintah tidak berdampak terhadap naik turunnya kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom.

Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja satuan Kabupaten Keerom, misalnya kepemimpinan, politik, penguasaan teknologi dan aplikasi keuangan. Pada tingkatan pendidikan rata-rata pegawai sudah memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik, tapi bila dilihat dari jabatan

bendahara dengan jurusan pendidikan didapati hanya satu orang saja yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, 5 orang yang berlatar belakang pendidikan jurusan ekonomi, dan bahkan ada 3 orang bendahara yang latar belakang pendidikannya hanya SMA.

Meskipun begitu rata-rata pengelola keuangan memahami sistem akuntansi keuangan pemerintah melalui pengalaman pegawai itu sendiri dengan usia yang sangat produktif dan rajin mengikuti pelatihan tentang akuntansi. Inilah yang membuat kinerja satuan kerja tetap baik meskipun dalam hal pemahaman peraturan pemerintah tentang sistem akuntansi keuangan pemerintah masih terbatas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pemahaman sistem akuntansi, pengendalian keuangan daerah dan sistem pelaporan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan analisis regresi linear berganda menghasilkan Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat.

2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja

Hasil analisis menyangkut pengaruh pengelolaan keuangan pemerintah yang diukur melalui indikator sebagai berikut: Perencanaan; Pelaksanaan; Pengawasan; dan Pertanggungjawaban terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom, menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom.

Hal ini disebabkan masih banyak pegawai yang rangkap jabatan khususnya dalam hal mengelola keuangan negara, diantaranya : salah satu Kementerian membawahi 7 Satuan Kerja dengan Satu orang PPK saja; 1 orang merangkap KPA dan PPK; Bendahara pengeluaran, PPABP dan petugas pembantu pengelola keuangan di kerjakan oleh 1 orang saja; dan seharusnya satu satker minimal 2 staf pembantu pengelola

keuangan, apabila satuan kerja tersebut banyak pengawainya maka 3-4 staf yang akan membantu tetapi karena sangat kurangnya petugas pembantu pengelola keuangan yang akhirnya pekerjaan ini di kerjakan secara rangkap oleh pejabat pengelola keuangan yang lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Faiza yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja.

Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fauzy Ardy Nugroho dalam judulnya "Pengaruh pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah (studi kasus dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) se ekskarisidenan Surakarta)" menghasilkan secara parsial variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.

3. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Satuan Kerja

Hasil analisis menyangkut pengaruh lingkungan kerja yang diukur melalui indikator sebagai berikut: Struktur tugas; Kebijakan dan administrasi dalam pekerjaan; Suasana Kerja; Pola kepemimpinan; Pola kerjasama; dan Ketersediaan sarana dan prasarana kerja terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom, di dapati bahwa variabel ini berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom.

Lingkungan kerja yang baik berpengaruh didalam diri pegawai maupun instansi sehingga pegawai bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik pula. Ini artinya dengan struktur tugas yang jelas, administrasi dan aturan yang di taati, suasana kerja yang mendukung, imbalan yang pantas, pola kepemimpinan yang bisa meningkatkan kinerja, team working terjalin baik, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, maka akan tercipta lingkungan kerja

yang kondusif, pegawai dapat bekerja secara optimal dan kinerja instansi pemerintah akan tercapai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika lingkungan kerja semakin baik, maka semakin besar pula kinerja satuan kerja pemerintah yang dicapai. Sehingga untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perlu dilakukan terobosan-terobosan baru yang mendukung lingkungan kerja itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tri Widodo, Susan dan T. Nurhaida memberikan bukti bahwa lingkungan kerja yang efektif dan efisien berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai dan pencapaian kinerja satuan kerja.

4. Pengaruh secara bersama-sama Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Satuan Kerja

Dari hasil analisis data didapati bahwa secara bersama-sama pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan pemerintah dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom.

Hal ini berarti bahwa bila pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah meningkat, makin baik pengelolaan keuangan pemerintah dan lingkungan kerja makin baik, maka kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom yang dicapai mengalami peningkatan pula. Dan sebaliknya, bila pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah berkurang, pengelolaan keuangan pemerintah tidak baik dan lingkungan kerja tidak menunjang, maka kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom yang dicapai mengalami penurunan juga.

Ini dibuktikan pula dengan penelitian terdahulu dalam Cut Faiza Syahrida dan Askam Tuasikal menyatakan bahwa secara simultan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD,

tetapi untuk secara simultan pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan dan lingkungan kerja masih merupakan hal baru dalam penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom, hal ini disebabkan oleh pemahaman peraturan pemerintah tentang sistem akuntansi keuangan pemerintah masih terbatas.
- b. Pengelolaan keuangan pemerintah terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom, hal ini disebabkan oleh menempatkan pegawai dalam jabatan pengelola keuangan masih banyak yang belum sesuai dengan profesionalisme jabatan itu sendiri;
- c. Lingkungan kerja terbukti berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom, paling banyak disebabkan oleh pola kerja sama yang dibina dengan baik antara bawahan dengan atasan;
- d. Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan pemerintah dan lingkungan kerja, terbukti berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Keerom; dan lingkungan kerja yang paling dominan.

2. Saran

- a. Bagi pihak pengambil keputusan atau para atasan untuk lebih memperhatikan jabatan/posisi pada setiap pengelola keuangan dalam hal ini latar belakang pendidikan dan penguasaan peraturan tentang keuangan sehingga sesuai dengan jabatan/posisi yg ditugaskan.
- b. Bagi pengelola keuangan untuk mengutamakan tugas dan tanggung jawab yang di emban serta menyusun rencana kerja yang di dasari

pada pengalaman sebelumnya sehingga mempermudah pekerjaan dan menghasilkan layanan yang prima untuk masyarakat.

- c. Penelitian ini masih membutuhkan pengembangan dengan penelitian lain, mengubah atau menambah variabel bebasnya sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi terhadap Kinerja Satuan Kerja. Disarankan untuk menambah variabel seperti kepemimpinan, teknologi informasi, aplikasi keuangan, karakteristik pemerintah, politik, sumber daya manusia dan budaya.

DAFTAR PUSATA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.
- Hadi Sutrisno. 2007. *Metodologi research: untuk penulisan paper, skripsi, tesis dan disertasi*, Jilid I-IV. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi. Yogyakarta.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Kementerian Keuangan RI. 2012. *Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah*.
- Kadir. 2009. *Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Awas'09. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2011. *Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang *Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang *Pengelolaan Uang Negara/ Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Rivai dan Basri. 2005. *Performance Apraisal: Sistem yang tepat untuk Penilaian Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Susan R. 2010. *Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Katolik (PAK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Keerom*. Jakarta
- Tri Widodo. 2010. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, Kepemimpinan terhadap Kinerja (Studi pada Pegawai Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*. Among Makarti Vol 3 No.5 Juli 2010
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara dan Agenda Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*